



Implementasi Kebijakan Beasiswa Afirmasi dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi bagi Orang Asli Papua

Aryoko A. F. Rumaropen*, Akbar Silo, Vince Tebay, Yustus Pondayar, Yesaya Sambra Saneraro Wamaer

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

* E-mail Korespondensi Penulis: s3aryoko@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

affirmative scholarship policy, policy implementation, human resource development, Indigenous Papuans, Papua Province

How to Cite:

Rumaropen, A.A.F., Silo, A., Tebay, V., Pondayar, Y., Wamaer, Y.S.S. (2025). Implementasi Kebijakan Beasiswa Afirmasi dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi bagi Orang Asli Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 13(3): 155-163.

DOI:

10.31957/jeb.v13i3.5326

ABSTRACT

This study examines the implementation of the affirmative scholarship policy in Papua Province and its contribution to the development of human resources among Indigenous Papuans (Orang Asli Papua/OAP). The policy was introduced as part of the government's effort to reduce educational inequality and expand access to higher education for communities that have historically experienced structural disadvantages. Despite its strategic objectives, the implementation of the scholarship program has encountered several governance and administrative challenges. This research employs a qualitative descriptive approach to explore the dynamics of policy implementation. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, and document analysis involving government officials, scholarship administrators, higher education institutions, and scholarship recipients. Informants were selected using purposive and snowball sampling techniques. Data were analyzed using an interactive qualitative model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, complemented by a SWOT analysis to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats in policy implementation. The findings show that the affirmative scholarship policy has expanded access to higher education for Indigenous Papuans and contributed to strengthening regional human resource capacity. However, its effectiveness is influenced by institutional capacity, administrative governance, coordination among implementing agencies, and the availability of reliable data systems. Challenges such as delays in scholarship fund disbursement and weak monitoring mechanisms remain significant issues. Strengthening governance structures, improving institutional coordination, and developing integrated information systems are therefore essential to enhance the sustainability and effectiveness of the affirmative scholarship policy in supporting equitable human resource development in Papua.

Copyright © 2025 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

kebijakan beasiswa afirmatif, implementasi kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, masyarakat adat Papua, Provinsi Papua

Cara Mengutip:

Rumaropen, A.A.F., Silo, A., Tebay, V., Pondayar, Y., Wamaer, Y.S.S. (2025). Implementasi Kebijakan Beasiswa Afirmasi dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi bagi Orang Asli Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 13(3): 155-163.

DOI:

10.31957/jeb.v13i3.5326

ABSTRAK

Studi ini meneliti implementasi kebijakan beasiswa afirmatif di Provinsi Papua dan kontribusinya terhadap pengembangan sumber daya manusia di kalangan Masyarakat Adat Papua (Orang Asli Papua/OAP). Kebijakan ini diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan memperluas akses ke pendidikan tinggi bagi masyarakat yang secara historis mengalami kerugian struktural. Terlepas dari tujuan strategisnya, implementasi program beasiswa ini telah menghadapi beberapa tantangan tata kelola dan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika implementasi kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus, dan analisis dokumen yang melibatkan pejabat pemerintah, administrator beasiswa, lembaga pendidikan tinggi, dan penerima beasiswa. Informan dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel purposif dan snowball. Data dianalisis menggunakan model kualitatif interaktif yang terdiri dari reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan, dilengkapi dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan beasiswa afirmatif telah memperluas akses ke pendidikan tinggi bagi Masyarakat Adat Papua dan berkontribusi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia regional. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, tata kelola administrasi, koordinasi antar lembaga pelaksana, dan ketersediaan sistem data yang andal. Tantangan seperti keterlambatan penyaluran dana beasiswa dan mekanisme pemantauan yang lemah tetap menjadi isu penting. Oleh karena itu, penguatan struktur tata kelola, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan pengembangan sistem informasi terpadu sangat penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan beasiswa afirmatif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang adil di Papua.

Hak Cipta© 2025 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Kawasan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara luas diakui sebagai indikator kunci pembangunan daerah karena kualitas sumber daya manusia sangat memengaruhi kapasitas masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kemajuan pendidikan. Secara global, kualitas pembangunan manusia umumnya diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengevaluasi kemajuan melalui indikator seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (UNDP, 2020). Dalam konteks Indonesia, khususnya di Provinsi Papua, peningkatan kualitas sumber daya manusia telah menjadi prioritas strategis karena adanya kesenjangan pembangunan yang terus-menerus dibandingkan dengan daerah lain di negara ini. Kesenjangan ini tercermin dalam akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, isolasi geografis, dan tantangan sosial-ekonomi struktural yang dialami

oleh banyak masyarakat di Papua. Akibatnya, pemerintah daerah telah menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai agenda utama dalam kebijakan pembangunannya, dengan menekankan percepatan pendidikan dan program afirmasi yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan daya saing sumber daya manusia Papua.

Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia adalah program beasiswa afirmasi yang didanai melalui Dana Otonomi Khusus. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat adat Papua (Orang Asli Papua/OAP) dengan memberikan kesempatan untuk belajar di berbagai perguruan tinggi dan universitas, baik di dalam maupun luar negeri. Program beasiswa ini mencakup komponen penting seperti biaya kuliah dan biaya hidup, sehingga memungkinkan penerima beasiswa untuk melanjutkan studi mereka tanpa hambatan finansial yang signifikan. Selain itu, kebijakan beasiswa afirmatif ini selaras dengan kebijakan pendidikan nasional, khususnya Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), yang dirancang untuk mendukung siswa dari daerah yang kurang beruntung, terpencil, dan terisolasi dalam mengakses kesempatan pendidikan tinggi (Karim, 2019). Melalui kerangka kebijakan ini, pemerintah berupaya mengatasi ketidaksetaraan struktural dalam akses pendidikan sekaligus membina generasi baru lulusan Papua yang terampil yang dapat berkontribusi pada pembangunan daerah.

Terlepas dari tujuan strategis program beasiswa afirmatif, implementasinya telah menghadapi beberapa tantangan tata kelola dan administrasi. Berbagai masalah telah muncul dalam pengelolaan program beasiswa, termasuk kelemahan dalam mekanisme seleksi penerima beasiswa, keterbatasan sistem pemantauan dan evaluasi, dan masalah koordinasi kelembagaan di antara lembaga pelaksana. Selain itu, tantangan administratif seperti keterlambatan pencairan dana beasiswa telah memengaruhi keberlanjutan studi bagi banyak penerima beasiswa, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun desain kebijakan pendidikan bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan dan pengembangan sumber daya manusia, efektivitas program sebagian besar bergantung pada kualitas implementasi kebijakan dan mekanisme tata kelola kelembagaan. Dalam studi kebijakan publik, keberhasilan hasil kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan tujuan kebijakan tetapi juga oleh efektivitas proses implementasi, kapasitas administratif, dan koordinasi antar pemangku kepentingan (Grindle, 1980).

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan beasiswa afirmatif di Papua harus dipahami bukan hanya sebagai program bantuan pendidikan tetapi sebagai instrumen strategis untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural dan mendorong transformasi sosial. Kebijakan afirmatif dalam pendidikan sering dirancang sebagai intervensi korektif yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok dan komunitas yang secara historis terpinggirkan dengan peluang sosial ekonomi yang terbatas (Nussbaum, 2016). Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, mekanisme akuntabilitas, dan partisipasi inklusif di antara para aktor kebijakan. Mengkaji implementasi kebijakan beasiswa afirmatif sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia di kalangan masyarakat adat Papua. Analisis tersebut dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan desain kebijakan dan praktik tata kelola sehingga program beasiswa afirmatif dapat lebih efektif mendukung pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan di Provinsi Papua.

Selain itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan beasiswa afirmatif di Papua memiliki urgensi yang tinggi karena kebijakan tersebut merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pembangunan sumber daya manusia di wilayah dengan tingkat kesenjangan pembangunan yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Meskipun berbagai studi telah membahas kebijakan afirmasi pendidikan dan peran bantuan finansial dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi kelompok marginal (Dynarski, 2017; Karim, 2019), sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek akses pendidikan atau dampak program secara umum. Penelitian yang secara khusus menganalisis dinamika implementasi kebijakan, tata kelola kelembagaan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam konteks daerah otonomi khusus seperti Papua masih relatif terbatas. Padahal, dalam perspektif studi implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antar aktor kebijakan, dan konteks sosial politik di mana kebijakan tersebut dijalankan (Grindle, 1980; Hill & Hupe, 2009). Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dengan mengkaji implementasi kebijakan beasiswa afirmatif secara komprehensif melalui analisis tata kelola kebijakan, interaksi kelembagaan, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang memengaruhi efektivitas program dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian mengenai kebijakan afirmasi pendidikan di Indonesia, tetapi juga memberikan pemahaman empiris mengenai bagaimana kebijakan pembangunan sumber daya manusia di wilayah otonomi khusus dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan beasiswa afirmatif di Provinsi Papua dan perannya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di kalangan Masyarakat Adat Papua (Orang Asli Papua/OAP). Pendekatan kualitatif tepat untuk penelitian ini karena memungkinkan eksplorasi mendalam tentang proses kebijakan, dinamika tata kelola, dan interaksi kelembagaan yang memengaruhi implementasi kebijakan (Creswell & Creswell, 2018). Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya memahami bagaimana kebijakan beasiswa afirmatif diimplementasikan, tantangan yang dihadapi dalam tata kelolanya, dan sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Papua. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji implementasi kebijakan dalam konteks sosial dan kelembagaannya, yang sangat penting di daerah dengan karakteristik sosial budaya dan administrasi yang kompleks seperti Papua. Dalam konteks ini, penelitian ini mengkaji implementasi program beasiswa afirmatif sebagai bagian dari kerangka kebijakan yang lebih luas yang bertujuan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi Masyarakat Adat Papua.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua, dengan fokus pada lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan implementasi program beasiswa afirmatif. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, yang umum digunakan dalam penelitian kebijakan kualitatif untuk mengidentifikasi aktor kunci dengan pengetahuan dan pengalaman yang relevan (Patton, 2015). Informan terdiri dari pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan beasiswa, pelaksana kebijakan di lembaga terkait, perwakilan lembaga pendidikan tinggi, dan mahasiswa penerima beasiswa. Pengumpulan data dilakukan

melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus (FGD), dan analisis dokumen, termasuk peraturan kebijakan, laporan resmi pemerintah, dan dokumen administratif yang berkaitan dengan program beasiswa. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif dan andal sekaligus memastikan kredibilitas temuan melalui triangulasi sumber data dan perspektif (Yin, 2018).

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis data kualitatif interaktif, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, et al., 2014). Pada tahap pertama, data yang diperoleh dari wawancara, FGD, dan dokumen diorganisasikan dan diringkas untuk mengidentifikasi tema-tema penting yang berkaitan dengan implementasi kebijakan beasiswa afirmatif. Pada tahap kedua, data tersebut ditampilkan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan dinamika tata kelola yang memengaruhi hasil kebijakan. Terakhir, kesimpulan ditarik melalui proses interpretatif yang menghubungkan temuan empiris dengan perspektif teoritis yang relevan dalam studi kebijakan publik dan tata kelola. Untuk memperkuat kerangka analitis, penelitian ini juga memasukkan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi program beasiswa afirmatif di Papua. Pendekatan analitis ini memungkinkan penelitian untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang implementasi kebijakan sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan memperkuat kontribusi program beasiswa afirmatif terhadap pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Papua.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti juga memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian sosial untuk memastikan perlindungan terhadap partisipan penelitian. Sebelum proses wawancara dan diskusi kelompok fokus dilakukan, setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, prosedur pengumpulan data, serta penggunaan informasi yang diberikan dalam konteks akademik. Partisipasi informan bersifat sukarela dan didasarkan pada prinsip *informed consent*, di mana informan memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan serta menghentikan keterlibatan mereka kapan saja tanpa konsekuensi apa pun. Peneliti juga menjamin kerahasiaan identitas informan dengan tidak mencantumkan nama pribadi dalam laporan penelitian dan hanya menggunakan data untuk kepentingan analisis ilmiah. Pendekatan etis ini bertujuan untuk menjaga integritas penelitian sekaligus melindungi hak dan kenyamanan informan selama proses pengumpulan data.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kebijakan Beasiswa Afirmasi dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi bagi Orang Asli Papua

Implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh interaksi antara isi kebijakan dan konteks di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua dimensi utama: isi kebijakan dan konteks implementasi, yang meliputi kepentingan aktor yang terlibat, pengaturan kelembagaan, dan distribusi sumber daya. Dalam kasus kebijakan beasiswa afirmatif di Provinsi Papua, isi kebijakan dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural dalam akses ke pendidikan tinggi yang dialami oleh Masyarakat Adat Papua (OAP). Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas kesempatan pendidikan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan

berkontribusi pada pembangunan daerah melalui pemberian beasiswa yang didanai oleh Dana Otonomi Khusus. Program beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi, memastikan keberlanjutan studi mahasiswa, dan menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi pada pembangunan Papua.

Dari perspektif isi kebijakan, kebijakan beasiswa afirmatif mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keadilan distributif dalam pendidikan dengan menargetkan kelompok-kelompok marginal yang memiliki akses terbatas terhadap kesempatan pendidikan tinggi. Kebijakan semacam ini sering diimplementasikan untuk memperbaiki ketidaksetaraan struktural yang muncul dari kerugian historis, sosial-ekonomi, dan geografis (Sodik & Riantani, 2026; Nussbaum, 2016). Di Papua, kebijakan beasiswa afirmatif memberikan dukungan keuangan yang mencakup biaya kuliah dan biaya hidup bagi mahasiswa yang belajar di dalam negeri maupun di luar negeri. Dukungan keuangan ini dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan ekonomi yang seringkali mencegah masyarakat adat Papua mengakses pendidikan tinggi. Dengan menyediakan kesempatan pendidikan bagi mahasiswa OAP, kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal dan mengurangi kesenjangan regional dalam pencapaian pendidikan.

Selain isi kebijakan, Grindle (1980) menekankan pentingnya konteks implementasi, yang meliputi kapasitas kelembagaan, dukungan politik, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan. Dalam implementasi kebijakan beasiswa afirmatif di Papua, beberapa lembaga pemerintah memainkan peran penting dalam mengelola program beasiswa, termasuk lembaga pemerintah provinsi yang bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan. Namun, efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga-lembaga tersebut, serta ketersediaan sistem administrasi yang mampu mendukung pelaksanaan kebijakan (Cahyono, 2026; Fahmi, 2025). Koordinasi kelembagaan yang lemah dan inefisiensi administrasi dapat mengurangi efektivitas implementasi kebijakan bahkan ketika desain kebijakan itu sendiri sudah tepat.

Implementasi kebijakan beasiswa afirmatif dipengaruhi oleh kapasitas lembaga pelaksana untuk mengelola proses administrasi, termasuk seleksi penerima manfaat, penyaluran dana, pemantauan, dan mekanisme evaluasi. Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan prosedur yang transparan dan sistem manajemen data yang andal untuk memastikan bahwa manfaat beasiswa sampai kepada penerima yang dituju. Studi tentang implementasi kebijakan menekankan bahwa kapasitas lembaga pelaksana memainkan peran penting dalam menentukan apakah tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif (Pressman & Wildavsky, 1984). Dalam konteks Papua, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan mekanisme tata kelola sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program beasiswa afirmatif.

Dengan demikian, implementasi kebijakan beasiswa afirmatif di Papua menggambarkan interaksi kompleks antara tujuan kebijakan, pengaturan kelembagaan, dan kapasitas tata kelola. Kebijakan ini memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di kalangan masyarakat adat Papua; Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan lembaga pemerintah untuk mengelola kebijakan tersebut secara transparan, akuntabel, dan terkoordinasi. Penerapan kerangka implementasi Grindle membantu mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan kebijakan dengan memeriksa bagaimana isi kebijakan dan konteks implementasi berinteraksi dalam membentuk hasil kebijakan.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Beasiswa Afirmasi dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi bagi Orang Asli Papua

Implementasi kebijakan publik seringkali dibentuk oleh kombinasi faktor pendukung dan hambatan yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Dalam konteks kebijakan beasiswa afirmatif di Papua, beberapa faktor pendukung berkontribusi pada implementasi program tersebut, khususnya komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan ketersediaan sumber daya keuangan melalui Dana Otonomi Khusus. Komitmen pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia tercermin dalam kebijakan pembangunan daerah yang memprioritaskan peningkatan pendidikan dan program beasiswa bagi masyarakat adat Papua. Komitmen kebijakan tersebut memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya dialokasikan untuk program yang bertujuan untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi dan memperkuat pengembangan modal manusia daerah (Hill & Hupe, 2009).

Faktor pendukung penting lainnya adalah meningkatnya kesadaran di kalangan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan sebagai penggerak pembangunan sosial dan ekonomi. Kebijakan pendidikan yang dirancang untuk mendukung kelompok marginal seringkali mendapat dukungan kuat dari lembaga pemerintah dan masyarakat luas karena kebijakan tersebut mengatasi masalah ketidaksetaraan sosial dan keterbatasan akses terhadap kesempatan pendidikan. Di Papua, kebijakan beasiswa afirmatif telah membantu meningkatkan jumlah mahasiswa pribumi Papua yang dapat mengejar pendidikan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Seperti yang ditunjukkan dalam data disertasi, ratusan mahasiswa Papua telah berpartisipasi dalam program beasiswa yang memberikan kesempatan untuk belajar di berbagai universitas di Indonesia dan luar negeri.

Terlepas dari faktor-faktor pendukung ini, implementasi kebijakan beasiswa afirmatif juga menghadapi beberapa tantangan signifikan. Salah satu kendala utama berkaitan dengan masalah administrasi dan tata kelola dalam mengelola dana beasiswa dan memantau kemajuan mahasiswa. Laporan menunjukkan bahwa keterlambatan pencairan dana beasiswa dan kelemahan dalam manajemen administrasi telah memengaruhi keberlanjutan studi bagi beberapa penerima beasiswa. Tantangan administratif ini menyoroti pentingnya membangun sistem manajemen keuangan yang efektif dan struktur tata kelola yang transparan untuk memastikan penyampaian manfaat beasiswa tepat waktu.

Tantangan utama lainnya berkaitan dengan koordinasi kelembagaan dan sistem manajemen data. Implementasi kebijakan publik yang efektif membutuhkan koordinasi yang kuat antar lembaga yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi program kebijakan. Namun, pengaturan kelembagaan yang terfragmentasi dan integrasi sistem data yang terbatas dapat mengurangi efisiensi manajemen program beasiswa. Menurut studi implementasi, koordinasi yang lemah antar aktor kebijakan seringkali menyebabkan inefisiensi dan kesenjangan implementasi antara tujuan kebijakan dan hasil kebijakan (Grindle, 1980). Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi dan peningkatan sistem informasi terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan beasiswa.

Selain itu, faktor sosial budaya dan geografis juga memengaruhi implementasi kebijakan beasiswa afirmatif di Papua. Papua dicirikan oleh komunitas budaya yang beragam dan kondisi geografis yang menantang yang dapat memengaruhi akses ke

lembaga pendidikan dan layanan administrasi. Implementasi kebijakan dalam konteks seperti itu membutuhkan pendekatan tata kelola adaptif yang mempertimbangkan kondisi lokal dan partisipasi masyarakat. Dengan mengatasi kelemahan administrasi, memperkuat koordinasi kelembagaan, dan mempertimbangkan dinamika sosial budaya, kebijakan beasiswa afirmatif dapat menjadi instrumen yang lebih efektif untuk mempromosikan pembangunan sumber daya manusia yang adil di Provinsi Papua.

4. Kesimpulan

Implementasi kebijakan beasiswa afirmatif di Provinsi Papua menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memainkan peran strategis dalam memperluas akses ke pendidikan tinggi dan memperkuat pengembangan sumber daya manusia di kalangan masyarakat adat Papua. Dari perspektif kerangka implementasi kebijakan Grindle, efektivitas kebijakan ini dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, termasuk kapasitas kelembagaan, sistem administrasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Isi kebijakan mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural dalam pendidikan dengan memberikan dukungan keuangan dan peluang bagi masyarakat adat Papua untuk mengejar pendidikan tinggi. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada desain kebijakan tetapi juga pada kemampuan lembaga pelaksana untuk mengelola proses administrasi, berkoordinasi antar pemangku kepentingan, dan memastikan mekanisme tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, studi ini mengidentifikasi beberapa faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi implementasi kebijakan beasiswa afirmatif di Papua. Komitmen pemerintah yang kuat, ketersediaan pendanaan melalui Dana Otonomi Khusus, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan faktor pendukung utama yang memungkinkan program ini untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat adat Papua. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih tetap ada, khususnya terkait dengan manajemen administrasi, koordinasi antar lembaga pelaksana, dan keterlambatan pencairan dana beasiswa. Kendala-kendala ini menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem tata kelola, manajemen data, dan koordinasi kelembagaan untuk memastikan program beasiswa dapat beroperasi lebih efektif dan berkelanjutan. Penguatan aspek-aspek ini akan memungkinkan kebijakan beasiswa afirmatif berfungsi lebih optimal sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan sumber daya manusia yang adil dan mendukung kemajuan sosial-ekonomi jangka panjang di Provinsi Papua.

Daftar Pustaka

- Cahyono, Y. (2026). Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1), 14-19.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dynarski, S. (2017). *The importance of financial aid for college access and success*. *Journal of Economic Perspectives*, 31(1), 45–66.
- Fahmi, M. (2025). Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 1-7.

- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2009). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (2nd ed.). Sage Publications.
- Karim, A. G. (2019). Implementasi kebijakan afirmasi pendidikan tinggi bagi mahasiswa Papua di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(2), 135–148.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nussbaum, M. (2016). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.
- OECD. (2020). *Education at a glance 2020: OECD indicators*. OECD Publishing.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.
- Sodik, G., & Riantani, S. (2026). Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi terhadap Pendapatan, Ketimpangan, dan Kemiskinan di Indonesia: Suatu Tinjauan Pustaka Economic Development oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 95-116.
- UNDP. (2020). *Human development report 2020: The next frontier—Human development and the Anthropocene*. United Nations Development Programme.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.